BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Menganalisis perkembangan kedalaman kemiskinan terhadap variabel kepadatan penduduk, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, dan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2018 hingga 2022.

5.1.1 Perkembangan pertumbuhan kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan indikator dari pada tekanan penduduk disuatu daerah. Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per satuan luas (Badan Pusat Statistik, 2023) Adapun kegunaannya yaitu sebagai dasar kebijakan pemerataan penduduk dalam program transmigrasi. Berikut ini merupakan data kepadatan penduduk di Jawa Provinsi Jambi tahun 201-2022.

Tabel 5.1 Kepadatan Penduduk di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022 (%).

Kabupaten/Kota	Tahun					Rata-rata (%)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Kerinci	71	71	75	75	74	73,2
Merangin	50	51	46	46	47	53,4
Sarolangun	48	49	47	48	50	48,4
Batanghari	47	47	52	53	58	51,4
Muaro Jambi	81	83	75	76	79	78,8
Tanjung Jabung Timur	40	40	42	43	52	43,3
Tanjung Jabung Barat	71	72	68	69	59	67,8
Tebo	54	55	52	53	56	54
Bungo	79	80	78	79	78	78,8
Kota Jambi	2.911	2.944	2.951	3.000	3.647	2.491
Kota Sungai Penuh	230	232	247	250	272	246
Rata-rata (%)						298,7

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah), 2023

Berdasarkan Tabel 5.1, Provinsi Jambi, yang terletak di bagian tengah Pulau Sumatera, mengalami perkembangan dalam hal kepadatan penduduk selama periode 2018 hingga 2022, rata-rata perkembangan kepadatan penduduk tertinggi ada pada Kota Jambi yang mencapai 2.491%, dan rata-rata kepadatan penduduk terendah ada pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mencapai 43,3%. Tidak

meratanya kepadatan penduduk di Jambi sangat jelas terlihat antara daerah yang sangat padat penduduk dengan daerah yang tidak padat penduduk. Pada tahun 2022 merupakan tahun dengan kepadatan penduduk tertinggi dengan rata-rata yaitu sebesar 3,647 jiwa per km² diantara tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), peningkatan kepadatan penduduk di provinsi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pertumbuhan alami (kelahiran dan kematian), migrasi, serta perkembangan ekonomi yang menarik pendatang dari daerah lain.

Kepadatan Penduduk Selama periode 2018 hingga 2022 di Jambi relatif stabil, dengan rata-rata angka kepadatan berkisar antara 298.7% di setiap tahunnya di Provinsi Jambi. Pada tahun 2018, kepadatan penduduk Jambi sekitar 3,5 juta jiwa, dan meningkat menjadi lebih dari 3,6 juta jiwa pada 2022. Peningkatan ini mencerminkan adanya dinamika kependudukan yang signifikan, khususnya di daerah perkotaan seperti Kota Jambi. Kota Jambi sebagai ibu kota provinsi memiliki kepadatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah kabupaten yang lebih terpencil, seperti Kabupaten Tebo, Merangin, atau Sarolangun. Pada 2022, kepadatan penduduk di Kota Jambi tercatat lebih dari 74 jiwa per km², sedangkan beberapa kabupaten hanya memiliki kepadatan kurang dari 50 jiwa per km².

Faktor Ekonomi dan Urbanisasi Peningkatan kepadatan penduduk di Jambi juga terkait dengan faktor ekonomi, terutama di sektor perkebunan dan pertambangan (Saputri & udjianto, 2023). Kota Jambi, sebagai pusat administratif dan perdagangan, mengalami urbanisasi yang pesat. Perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan semakin tinggi, didorong oleh pencarian peluang kerja yang lebih baik di sektor industri dan jasa. Dampak Peningkatan Kepadatan Penduduk Dengan meningkatnya jumlah dan kepadatan penduduk, beberapa tantangan muncul, terutama terkait dengan infrastruktur dan layanan publik. Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya memperbaiki akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan transportasi guna mengimbangi peningkatan populasi. Salah satu tantangan besar adalah penyediaan perumahan yang layak di wilayah perkotaan. Dampak Peningkatan Kepadatan Penduduk Dengan meningkatnya jumlah dan kepadatan penduduk, beberapa tantangan muncul, terutama terkait dengan

infrastruktur dan layanan publik. Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya memperbaiki akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan transportasi guna mengimbangi peningkatan populasi. Tantangan yang dihadapi termasuk kebutuhan akan peningkatan infrastruktur dan layanan publik yang harus diimbangi dengan laju pertumbuhan penduduk tersebut. Provinsi Jambi mengalami peningkatan kepadatan penduduk yang konsisten antara tahun 2018 hingga 2022. Peningkatan ini terutama terjadi di wilayah perkotaan, dengan kontribusi dari pertumbuhan alami dan migrasi.

5.1.2 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran merujuk pada kondisi di mana individu yang merupakan bagian dari angkatan kerja ingin memiliki pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya. Pengangguran tidak berlaku untuk orang yang tidak bekerja tetapi tidak aktif mencari pekerjaan. Ketidakseimbangan lapangan kerja yang tersedia dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk adalah penyebab pengangguran. Artinya, ada lebih banyak tenaga kerja daripada pekerjaan, yang berarti beberapa orang tidak memiliki pekerjaan.

Tabel 5.2 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022 (%).

Kabupaten/Kota	Tahun					Rata-rata (%)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Kerinci	2,86	2,36	2,43	2,32	2,63	2,52
Merangin	3,64	3,31	4,86	4,83	4,69	4,27
Sarolangun	4,18	5,32	5,71	5,52	5,22	5,19
Batanghari	4,1	6,27	4,42	4,26	3,53	4,52
Muaro Jambi	4,66	8,79	5,43	5,59	5,35	5,96
Tanjung Jabung Timur	1,85	1,78	1,41	1,56	1,32	1,58
Tanjung Jabung Barat	2,46	2,6	2,16	2,53	2,88	2,53
Tebo	2,07	3,69	2,95	2,83	1,38	2,58
Bungo	3,09	5,62	5,94	5,86	5,5	5,2
Kota Jambi	6,56	8,33	10,49	10,66	8,95	9
Kota Sungai Penuh	5,44	4,34	5,56	3	2,49	4,17
Rata-rata (%)						4,32

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah), 2023.

Menurut data tabel 5.2, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2018 paling tinggi tercatat di Kota Jambi sebesar 6,56% dan tingkat pengangguran terbuka paling rendah tercatat di Tanjung Jabung Timur sebesar 1,85%. Pada tahun 2019, hanya tiga kabupaten yang mengalami penurunan, dengan tingkat pengangguran terbuka paling tinggi tercatat di Kota Jambi sebesar 8,33 persen dan tingkat pengangguran terbuka paling rendah tercatat di Tanjung Jabung Timur sebesar 1,78 persen. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan dan penurunan, tingkat pengangguran terbuka paling tinggi terdapat di Kota Jambi sebesar 10,49% dan paling rendah terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 1,41%. Tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan di tahun 2021 dan hanya 4 Kabupaten yang mengalami peningkatan, tingkat pengangguran terbuka paling tinggi terdapat di Kota Jambi sebesar 10,66% dan paling rendah terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 1,56%. Dan di tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dan hanya 3 Kabupaten yang mengalami peningkatan, Tingkat pengangguran terbuka paling tinggi masih terdapat di Kota Jambi sebesar 8,95% dan yang paling rendah terdapat di Kabupaten Jabung Timur 1,32%.

Rata-rata tingkat pengangguran terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi selama periode 2018-2022 sebesar 4,32%. Tingkat pengangguran terbuka paling tinggi tahun 2018-2022 terdapat di Kota Jambi pada tahun 2021 sebesar 10,66%. Hal ini dikarenakan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan, terbatasnya kesempatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja, serta kebutuhan pasar kerja yang sangat berkualifikasi tinggi sementara keadaan angkatan kerja yang skill dan kompetensinya tidak memenuhi kriteria menjadikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan juga sedikit. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka paling rendah tahun 2018-2022 terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2022 sebesar 1,32%. Hal ini dikarenakan banyak penduduk wilayah ini yang bekerja pada perusahaan asing seperti petrochina dan lainnya, dan banyak yang keluar dari wilayah untuk bekerja di tempat lain dan mengadu nasib disana.

5.1.3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia

Nilai IPM berkisar antara 0 dan 1; nilai indeks mendekati 1 menunjukkan bahwa tingkat pembangunan manusia di daerah tersebut semakin meningkat dan sebaliknya. Diharapkan nilai IPM ini terus meningkat setiap tahunnya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi.

Tabel 5.3 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022 (Indeks).

Kabupaten/Kota	Tahun					Rata-rata (%)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Kerinci	70,59	70,95	72,47	72,72	73,24	71,99
Merangin	68,81	69,07	70,2	70,55	70,98	69,22
Sarolangun	69,41	69,72	71,63	72,02	72,66	71,09
Batanghari	69,33	69,67	71,34	71,61	71,99	70,79
Muaro Jambi	68,34	69,01	70,41	70,79	71,41	69,99
Tanjung Jabung Timur	63,32	63,92	67,58	68,09	68,96	66,37
Tanjung Jabung Barat	67,13	67,54	69,62	70,26	70,88	69,09
Tebo	68,67	69,02	70,51	70,73	71,14	70,01
Bungo	69,42	69,86	72,46	72,7	73,08	71,5
K. Jambi	77,41	78,26	79,19	79,94	80,38	79,04
K. Sungai Penuh	74,67	75,36	76,02	76,3	76,75	75,82
Rata-rata (%)						71,35

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah), 2023.

Berdasarkan data tabel 5.5 perkembangan nilai indeks pembangunan manusia pada tahun 2018 paling tinggi terdapat di Kota Jambi dengan nilai indeks pembangunan manusia sebesar 77,41 indeks dan paling rendah terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 63,32 indeks. Hal yang sama terjadi pada tahun 2019 dimana indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan, indeks pembangunan manusia paling tinggi masih di terdapat di Kota Jambi dengan indeks pembangunan manusia sebesar 78,26 indeks dan indeks pembangunan paling rendah terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 63,92 indeks. Pada tahun 2020 nilai indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan, indeks pembangunan manusia paling tinggi terdapat di Kota Jambi sebesar 79,19 indeks dan paling rendah di Kabupaten tanjung Jabung Timur sebesar 67,58 indeks. Peningkatan indeks pembangunan manusia terjadi hingga pada tahun 2021, indeks

pembangunan manusia paling tinggi terdapat di Kota Jambi sebesar 79,94 indeks dan paling rendah terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 68,09 indeks. Pada tahun 2022 indeks Pembangunan manusia paling tinggi terdapat di Kota Jambi sebesar 80,38 indeks, dan yang paling rendah terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 68,96 indeks.

Adapun rata-rata indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2018-2022 sebesar 71,35 indeks. Indeks pembangunan manusia paling tinggi selama periode 2018-2022 terdapat di Kota Jambi pada tahun 2022 dengan nilai indeks pembangunan manusia sebesar 80,38 indeks, hal ini dikarenakan pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan, infrastruktur yang ada di Kota Jambi lengkap dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain selain itu Kota Jambi merupakan Ibu Kota dari Provinsi Jambi. Indeks pembangunan paling rendah periode tahun 2018-2022 terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2018 dengan nilai indeks pembangunan manusia sebesar 63,32 indeks, hal ini dikarenakan meningkatnya angka kemiskinan dan angka partisipasi sekolah yang rendah.

5.1.4 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat digunakan sebagai indikator kesejahteraan penduduk suatu negara: semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin besar sektor riil di dalam negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP atau GNP, tanpa peduli apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah ada perubahan struktur ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sektor riil tersebut nantinya mampu diharapkan mampu meningkatkan kesempatan kerja di Provinsi Jambi. Untuk melihat bagaimana perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.4 Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi Tahun 2018-2021 (%).

Kabupaten/Kota	Tahun					Rata-rata (%)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Kerinci	4,93	4,23	3,81	3,89	4,43	4,32
Merangin	4,93	4,25	0,78	5,24	5,72	4,17
Sarolangun	4,8	4,26	-0,25	6,61	6,73	4,43
Batanghari	4,83	5,07	-0,43	4,85	12,27	5,3
Muaro Jambi	5,01	4,79	0,35	3,96	8,05	4,46
Tanjung Jabung Timur	2,94	4,21	-3,44	0,14	0,57	0,79
Tanjung Jabung Barat	6,77	5,01	-0,29	1,36	2,56	3,02
Tebo	4,98	4,76	-0,03	4,29	6,29	4,07
Bungo	4,65	4,19	-0,48	4,99	4,73	3,65
Kota Jambi	5,3	4,73	-4,24	4,13	5,38	3,09
Kota Sungai Penuh	4,88	5,01	-0,16	3,67	4,44	3,57
Rata-rata (%)						3,71

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023.

Berdasarkan tabel 5.4, pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi selama periode 2018 sampai 2022 mengalami fluktuasi. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi periode 2018-2022 adalah 3,71 %. Rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2018-2022 adalah Kabupaten Batanghari sebesar 5,30%. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batanghari tinggi karena kekayaan sumber daya alam, khususnya di sektor perkebunan dan pertambangan, serta didukung oleh investasi, pembangunan infrastruktur, dan kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan. Selain itu Kabupaten Batanghari juga industrinya banyak bergerak di bidang pengolahan dan perdagangan hasil bumi. Sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah pada tahun yang sama terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 0,79%. Hal ini dikarenakan potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak dapat diandalkan karena wilayah di kabupaten ini merupakan wilayah tanah gambut, sehingga produksi sektor pertanian dan perkebunan tidak mendukung, begitupun sektor sekunder dimana tidak banyak perusahaan yang memiliki ketertarikan untuk melaksanakan investasi pada daerah ini.

5.1.5 Perkembangan Kedalaman Kemiskinan

Kedalaman Kemiskinan Kedalaman kemiskinan adalah indikator yang menggambarkan seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Artinya, kedalaman kemiskinan mengukur kesenjangan antara penduduk miskin dengan garis kemiskinan yang ditetapkan, sehingga menunjukkan seberapa besar sumber daya yang diperlukan untuk mengangkat orang-orang di bawah garis kemiskinan ke tingkat yang setara dengan garis tersebut. Semakin besar indeks kedalaman kemiskinan, semakin jauh jarak pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Di sisi lain, indeks yang lebih rendah menunjukkan bahwa pengeluaran mereka relatif mendekati garis kemiskinan, sehingga lebih mudah diintervensi dengan kebijakan pemerintah.

Tabel 5.5 Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Jambi Tahun 2018-2021 (%).

Kabupaten/Kota	Tahun					Rata-Rata (%)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Kerinci	0,72	0,59	1,05	0,81	1,22	0,88
Merangin	1,86	1,39	0,94	1,25	1,21	1,33
Sarolangun	1,49	1,17	1,08	1,13	1,32	1,24
Batanghari	1,24	1,29	1,28	1,27	1,44	1,3
Muaro Jambi	0,68	0,39	0,31	0,47	0,4	0,45
Tanjung Jabung Timur	2,19	1,75	1,45	2,07	1,37	1,77
Tanjung Jabung Barat	1,7	1,68	1,58	1,96	1,61	1,7
Tebo	0,95	1,07	0,7	0,99	0,74	0,89
Bungo	0,62	0,81	0,72	0,92	0,81	0,78
Kota Jambi	1,26	1,52	1,47	1,42	1,19	1,37
Kota Sungai Penuh	0,26	0,25	0,62	0,43	0,28	0,37
Rata-rata (%)						1,1

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023.

Berdasarkan tabel 5.5 dapat dilihat, kedalaman kemiskinan di Provinsi Jambi, yang mencerminkan seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin di bawah garis kemiskinan, mengalami fluktuasi selama periode 2018-2022. Pada tahun 2018, angka kedalaman kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada di sekitar 2,19% dan perkembangan kedalaman kemiskinan terendah ada pada Kabupaten Bungo berada di sekitar 0,62%. Tahun 2019 angka

kedalaman kemiskinan paling tinggi terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 1,75%, dan yang paling rendah terdapat di Kota Sungai Penuh sebesar 0,26%. Tahun 2020 kedalaman kemiskinan paling tinggi terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 1,58%, dan paling rendah terdapat di Muaro Jambi sebesar 0,31%. Pada tahun 2021 kedalaman kemiskinan paling tinggi terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 2,07%, dan paling rendah terdapat di Kabupaten Muaro Jambi sebesar 0,47%. Dan pada tahun 2022 kedalaman kemiskinan paling tinggi terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 1,61%, dan yang paling rendah terdapat di Kabupaten Muaro Jambi sebesar 0,40%.

Adapun rata-rata kedalaman kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2018-2022 sebesar 1,10%. Rata-rata kedalaman kemiskinan paling tinggi selama periode 2018-2022 terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan nilai 1,77%, hal ini dikarenakan terbatasnya akses terhadap infrastruktur dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi, terutama di daerah terpencil. Selain itu, ketergantungan pada sektor primer seperti pertanian dan perikanan yang seringkali rentan terhadap fluktuasi harga dan cuaca, juga memperparah kondisi ekonomi masyarakat. Kedalaman kemiskinan paling rendah periode tahun 2018-2022 terdapat di Kota Sungai Penuh dengan nilai 0,37%, hal ini dikarenakan infrastruktur yang baik, akses layanan dasar, ekonomi yang beragam, serta dukungan pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan.

5.2 Menganalisis pengaruh kepadatan penduduk, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi terhadap kedalaman kemiskinan di Provinsi Jambi dari tahun 2018 hingga 2022.

5.2.1 Pemilihan Model

Dalam melakukan pengujian model terbaik untuk dapat menentukan mana dari ketiga model yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier yang paling sesuai dalam penggunaan data panel. Dimana hasil uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Uji Chow

Dengan berfokus pada signifikansi probabilitas dengan uji F-statistik, uji Chow berguna dalam menentukan antara model *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM), mana yang merupakan pilihan terbaik. Apabila Hipotesis H0: model CEM yang optimal dan apabila Hipotesis Ha: model FEM yang optimal. Uji chow yang diolah dengan menggunakan software Eviews 10 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.6 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.818822	(4,15)	0.0630
Cross-section Chi-square	13.453890	4	0.0093

Sumber: Output Eviews (Data Diolah)

Temuan dari pengolahan eviews ini menunjukkan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) adalah pilihan terbaik, dengan nilai F-statistic dan Chi-square yang signifikan (p-value 0,0630 dan 0,0093 lebih kecil dibandingkan alpha $\alpha= 0,05\%$). Akibatnya H0 ditolak dan Ha diterima,

2. Uji Hausman

Uji Hausman bertujuan untuk menentukan model optimal antara *fixed effect model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM) dengan menggunakan signifikansi Chi-square statistic. Dengan Hipotesis H0: model REM lebih optimal, dan Hipotesis Ha: model FEM lebih optimal. Hasil uji Hausman yang dianalisis dengan Eviews 10 ditunjukkan di bawah ini.

Tabel 5.7 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	11.275290	4	0.0236

Sumber : *Output Eviews (Data Diolah)*

Model optimal yang dipilih adalah *fixed effect model* (FEM), yang ditunjukkan dengan temuan pengolahan uji Hausman yang menampilkan hasil statistik Chi-square dengan p-value $0,0236 < 0,05$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Selanjutnya, pengujian Lagrange Multiplier yang akan dilakukan.

3. Uji Lagrange Multiplier

Dengan mempertimbangkan signifikansi *Breusch-Pagan*, uji LM digunakan untuk mengidentifikasi model yang paling sesuai antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Random Effect Model* (REM). Dengan menggunakan Hipotesis H_0 : model CEM yang optimal dan Hipotesis H_a : model REM yang optimal. Uji LM yang diolah dengan Eviews 10 ditunjukkan di bawah ini.

Tabel 5.8 Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange multiplier (LM) test for panel data
Date: 10/15/24 Time: 16:10
Sample: 2018 2022
Total panel observations: 24
Probability in ()

Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	2.445602 (0.1179)	1.619563 (0.2032)	4.065165 (0.0438)
Honda	-1.563842 (0.9411)	-1.272621 (0.8984)	-2.005682 (0.9776)

King-Wu	-1.563842 (0.9411)	-1.272621 (0.8984)	-2.005682 (0.9776)
GHM	-- --	-- --	0.000000 (0.7500)

Sumber : Output Eviews (Data Diolah)

Nilai probabilitas Breusch-Pagan pada cross-section sebesar $0,1179 > 0,05$ yang ditunjukkan oleh hasil pengolahan uji LM menunjukkan bahwa H_a ditolak dan H_0 diterima yang menunjukkan bahwa *Common Effect Model* merupakan pilihan yang optimal. Hasilnya, *Common Effect Model* (CEM) menjadi model terbaik yang dipilih untuk penelitian ini.

5.3 Uji Hipotesis

Berdasarkan pemilihan model yang dilakukan, maka *Common Effect Model* (CEM) terpilih menjadi model terbaik untuk mengestimasi.

5.3.1 Uji F-statistik

Di Provinsi Jambi, uji F-statistik digunakan untuk menentukan seberapa besar pengaruh Kepadatan Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kedalaman Kemiskinan secara simultan atau bersama-sama.

Tabel 5.9 Hasil uji F-statistik

R-squared	0.759919
Adjusted R-squared	0.709376
S.E. of regression	0.217905
Sum squared resid	0.902172
Log likelihood	5.317523
F-statistic	15.03500
Prob(F-statistic)	0.000011

Sumber : Output Eviews (Data Diolah)

Berdasarkan hasil uji F, nilai prob (F-statistik) yaitu sebesar 0.000011 yang lebih kecil dari tingkat signifikan sebesar 0,05 % sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kepadatan Penduduk, Tingkat

Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia Dan Pertumbuhan Ekonomi secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh signifikan terhadap terhadap Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Jambi.

5.3.2 Uji t-statistik

Pengaruh Kepadatan Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Jambi diukur dengan menggunakan uji t statistik.

Tabel 5.10 Hasil uji t-statistik

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 10/15/24 Time: 17:18
 Sample: 2018 2022
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 5
 Total panel (unbalanced) observations: 24

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.013648	2.529891	1.586491	0.1291
KP	-0.023549	0.003313	-7.107926	0.0000
TPT	-0.088963	0.032323	-2.752283	0.0127
IPM	-0.000178	0.000352	-0.505980	0.6187
PE	0.024609	0.017856	1.378138	0.1842

Sumber : Output Eviews (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 5.9 terdapat t hitung dan prob t hitung, Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial adalah sebagai berikut:

1. Hasil uji t pada variabel Kepadatan Penduduk (X1) diperoleh nilai t hitung sebesar 7,107926 lebih besar dari nilai t tabel yaitu 2,005745 dan nilai sig. 0,0000 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya variabel Kepadatan Penduduk berpengaruh terhadap Kedalaman Kemiskinan (Y) di Provinsi Jambi.
2. Hasil uji t pada variabel TPT (X2) diperoleh nilai t hitung sebesar 2.752283 lebih besar dari nilai t tabel yaitu 2,005745 dan nilai sig.

0,0127 lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel TPT berpengaruh terhadap Kedalaman Kemiskinan (Y) di Provinsi Jambi.

3. Hasil uji t pada variabel IPM (X3) diperoleh nilai t hitung sebesar 0.505980 lebih kecil dari nilai t tabel yaitu 2,005745 dan nilai sig. 0,6187 lebih besar dari 0,05, maka H_a ditolak dan H_0 diterima, artinya variabel IPM tidak berpengaruh terhadap Kedalaman Kemiskinan (Y) di Provinsi Jambi.
4. Hasil uji t pada variabel Pertumbuhan Ekonomi (X4) diperoleh nilai t hitung sebesar 1,378138 lebih kecil dari nilai t tabel yaitu 2,005745 dan nilai sig. 0,1842 lebih besar dari 0,05, maka H_a ditolak dan H_0 diterima, artinya variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Kedalaman Kemiskinan (Y) di provinsi jambi.

5.3.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi pada regresi data panel ini digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel berikut ini

Tabel 5.11 Hasil uji koefisien Determinasi

R-squared	0.759919
Adjusted R-squared	0.709376
S.E. of regression	0.217905
Sum squared resid	0.902172
Log likelihood	5.317523
F-statistic	15.03500
Prob(F-statistic)	0.000011

Sumber : Output Eviews (Data Diolah)

Nilai adjusted R Square sebesar 0,709376 atau 70,9376%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari Kepadatan Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan

Manusia, dan Pertumbuhan Ekonomi mampu menjelaskan variabel Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Jambi sebesar 70,9376%, sedangkan sisanya yaitu 29,0624% (100 - nilai adjusted R Square) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

5.4 Pembahasan Interpretasi hasil

5.4.1 Pengaruh Kepadatan Penduduk Terhadap Kedalaman Kemiskinan

Koefisien Kepadatan penduduk sebesar -0.023549, dengan nilai t hitung -7,107926 dan prob 0,0000. Diperoleh nilai t tabel 2,00574, yang menunjukkan bahwa $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ dan $\text{prob } t < 0,05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kepadatan penduduk miskin berpengaruh signifikan terhadap kedalaman kemiskinan. Hal ini terjadi dikarenakan kepadatan penduduk hanya mewakili satu komponen dari Kedalaman kemiskinan yaitu tingkat daya beli. Sedangkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang ada di Provinsi Jambi cukup baik, banyak dari masyarakat miskin menjangkau layanan kesehatan gratis dan jenjang pendidikan gratis hingga sampai pada perguruan tinggi. Dengan hal tersebut walaupun kepadatan penduduk bertambah mempengaruhi secara langsung terhadap kedalaman kemiskinan.

Kepadatan penduduk yang berpengaruh negatif signifikan terhadap fertilitas ternyata sejalan dengan penelitian Croix & Gobbi (2017) yang menunjukkan kepadatan penduduk berpengaruh negatif signifikan terhadap fertilitas di negara berkembang. Dalam penelitian tersebut juga ditemukan kesamaan dimana keluarga yang memilih sedikit anak yang dimiliki akan bermigrasi ke daerah yang penduduknya padat dengan tujuan untuk menikmati kesempatan dalam mendapatkan pendapatan yang lebih besar dan lebih baik, Sementara, ketika sebuah keluarga memilih untuk memiliki banyak anak maka akan memilih untuk pindah pada daerah yang lebih rendah tingkat kepadatannya sebab biaya yang dibutuhkan dalam membesarkan anak relatif rendah.

5.4.3 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kedalaman kemiskinan

Koefisien variabel Tingkat pengangguran terbuka yaitu -0.088963, dengan nilai t hitung -2,752283 dan prob 0,0127. Diperoleh nilai t tabel 2,00574, maka t hitung > t tabel dan prob t < 0,05, maka dapat disimpulkan TPT berpengaruh signifikan terhadap kedalaman kemiskinan. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori dimana dampak dari pengangguran akan meningkatkan kedalaman kemiskinan. Hal ini mungkin disebabkan penurunan tenaga kerja yang ada di Provinsi Jambi dominan terjadi pada sektor yang dengan garis kesejahteraan yang masih rendah seperti sektor pertanian dan perkebunan. Jadi jika tingkat pengangguran terbuka meningkat sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan dan kedalaman kemiskinan.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Schmitt (2008). Adapun hasil penelitian menyatakan bahwa pengangguran dapat membuat kenaikan fertilitas di Prancis, Finlandia, Jerman, dan Inggris tahun 1994- 2001. Didukung pula oleh studi yang pernah dilakukan oleh Yunifah & Sugiharti (2022) dengan objek penelitian yang sama yaitu kabupaten/kota di Jawa Tengah yang diteliti memiliki hubungan positif antara tingkat pengangguran terbuka dengan kedalaman kemiskinan.

5.4.4 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kedalaman Kemiskinan

Koefisien variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu -0.000178, dengan nilai t hitung -0,505980 dan prob 0,6187. Diperoleh nilai t tabel 2,00574, maka t hitung < t tabel dan prob t > 0,05, maka dapat disimpulkan IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap kedalaman kemiskinan. Hal tersebut tidak sesuai dengan hipotesis serta teori yang menjadi landasan teori dari penelitian ini ketika indeks pembangunan manusia (IPM) mengalami peningkatan dan akan sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan.

Indeks pembangunan manusia atau IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap kedalaman kemiskinan. Hal ini disebabkan karena peningkatan IPM yang

mencakup pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, tidak secara langsung menjamin perbaikan kesejahteraan kelompok miskin. Meskipun IPM mungkin meningkat, distribusi manfaat pembangunan tersebut bisa tidak merata, sehingga kelompok miskin tetap kesulitan mengakses layanan kesehatan atau pendidikan berkualitas. Selain itu, meski tingkat pendidikan meningkat, tidak selalu ada jaminan lapangan pekerjaan yang memadai bagi lulusan baru, terutama di sektor informal. Ketimpangan akses terhadap peluang ekonomi dan biaya hidup yang terus naik juga dapat mempertahankan atau bahkan memperburuk kedalaman kemiskinan, meskipun IPM meningkat.

Penelitian ini sejalan dengan Saadah (2020) Penelitian ini menemukan bahwa IPM meskipun penting, tidak selalu berkorelasi langsung dengan pengurangan kedalaman kemiskinan di beberapa wilayah tertentu. Hal ini disebabkan oleh ketidakmerataan distribusi pertumbuhan ekonomi dan masih terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.

5.4.5 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap kedalaman kemiskinan

Koefisien variabel Pertumbuhan Ekonomi yaitu 0.024609, dengan nilai t hitung 1,378138 dan prob 0,1842. Diperoleh nilai t tabel 2,00574, maka t hitung $<$ t tabel dan prob $t > 0,05$, maka dapat disimpulkan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kedalaman kemiskinan. Apabila pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, maka variabel lainnya konstan maka akan meningkatkan kedalaman kemiskinan.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori dimana dampak dari pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kedalaman kemiskinan. Hal ini mungkin disebabkan karena ketidakmerataan distribusi manfaat pertumbuhan. Meskipun sektor tertentu seperti perdagangan dan perkebunan kelapa sawit telah berkembang, petani kecil dan orang lain yang bekerja di sektor informal seringkali tidak merasakan peningkatan pendapatan yang signifikan. Tingkat kesejahteraan petani bergantung pada nilai tukar petani, yang selama periode penelitian cenderung masih di bawah 100, yang berarti kesejahteraan petani rendah. Selain itu, akses terbatas terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, serta minimnya kebijakan sosial yang

tepat juga membuat mereka sulit memanfaatkan peluang ekonomi baru. Inflasi yang terus meningkat turut memperburuk keadaan, sehingga kedalaman kemiskinan tetap tinggi meskipun ekonomi daerah tumbuh.

Dalam penelitian mereka, Ravallion dan Chen (1997) menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan, dampaknya terhadap pengurangan kedalaman kemiskinan bergantung pada tingkat ketimpangan. Jika ketimpangan tinggi, pertumbuhan ekonomi mungkin tidak banyak membantu orang yang sangat miskin.

5.5 Implikasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil regresi kepadatan penduduk dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif signifikan, sedangkan indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kedalaman kemiskinan. Diperlukan beberapa kebijakan yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut.

1. Kepadatan penduduk yang tinggi berpotensi memperburuk kedalaman kemiskinan melalui terbatasnya akses terhadap infrastruktur dasar, lapangan pekerjaan, dan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Persaingan yang ketat dalam mendapatkan pekerjaan dapat menekan upah dan meningkatkan pengangguran, sementara kenaikan harga lahan dan pangan membebani rumah tangga miskin. Selain itu, kualitas lingkungan yang menurun di daerah padat penduduk, seperti polusi dan kekurangan ruang hijau, memperparah kondisi hidup warga miskin. Oleh karena itu, kebijakan yang efektif perlu mengatasi masalah ini melalui pengembangan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja yang inklusif, serta pembangunan berkelanjutan di daerah padat penduduk dan daerah tertinggal.
2. Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi memiliki implikasi signifikan terhadap kedalaman kemiskinan, karena semakin banyaknya penduduk usia kerja yang tidak memiliki penghasilan memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga. Pengangguran yang berkepanjangan menyebabkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan,

dan kesehatan menurun, yang pada akhirnya mendorong masyarakat jatuh ke dalam kemiskinan yang lebih dalam. Kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi hal ini mencakup peningkatan akses terhadap pelatihan vokasional, penciptaan lapangan kerja di sektor-sektor produktif, serta dukungan bagi usaha mikro dan kecil. Pemerintah juga perlu fokus pada kebijakan ekonomi yang mendorong investasi dan pertumbuhan sektor formal agar peluang kerja lebih terbuka dan berkelanjutan.

3. Saat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh signifikan terhadap kedalaman kemiskinan, ini menunjukkan bahwa peningkatan IPM belum berhasil mengenai kelompok miskin secara efektif. Misalnya, meski ada peningkatan dalam akses pendidikan dan kesehatan, dampaknya tidak dirasakan oleh masyarakat miskin karena kualitas layanan yang tidak merata atau tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebijakan yang hanya berfokus pada peningkatan rata-rata IPM tanpa memperhatikan distribusi manfaat kepada kelompok miskin bisa menyebabkan kesenjangan tetap tinggi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan spesifik untuk kelompok rentan, seperti peningkatan kualitas layanan publik di daerah tertinggal serta program pendidikan dan kesehatan yang ditargetkan langsung kepada rumah tangga miskin, agar perbaikan IPM juga berdampak pada pengurangan kedalaman kemiskinan.
4. Jika pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kedalaman kemiskinan, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan produk domestik bruto (PDB) tidak diimbangi dengan distribusi kesejahteraan yang adil. Pertumbuhan yang menjadi terfokus pada sektor-sektor tertentu yang tidak memberikan manfaat langsung bagi kelompok miskin, sehingga mereka tetap terjebak dalam kondisi kemiskinan yang parah. Kebijakan yang mengandalkan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan aspek keadilan sosial dan inklusi dapat memperburuk kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang memfokuskan perhatian pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, dukungan terhadap usaha kecil dan menengah, serta program-program redistributif

yang memastikan bahwa hasil pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan.